

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

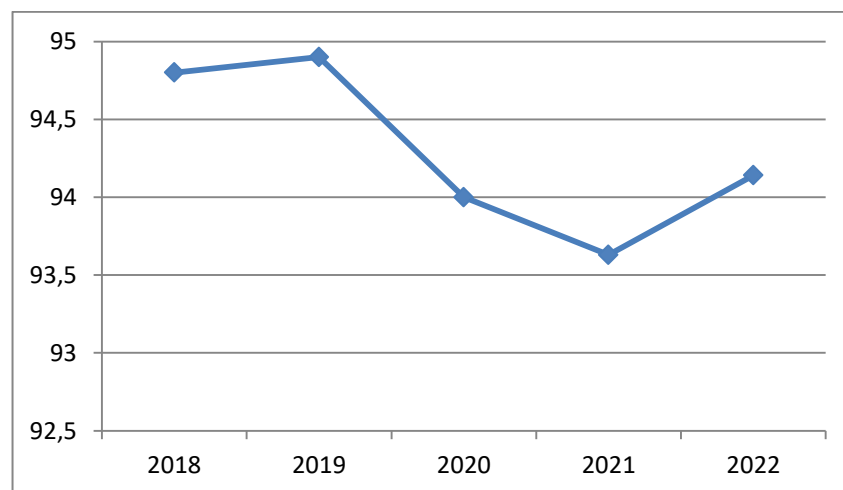
Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, kesempatan kerja masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kemiskinan merupakan masalah yang masih sering di jumpai di beberapa negara yang sedang berkembang, salah satunya di negara di Indonesia.

Kesempatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Ketika kesempatan kerja tinggi, pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lahan pekerjaan yang tersedia biasanya hanya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Hal Ini akan menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak pada penganggura Prasetya (2015).

Kesempatan kerja merupakan penyebab utama pengangguran di setiap negara. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan penderitaan karena kekurangan makanan dan gizi, rendahnya kesehatan dan pendidikan, serta berbagai keterbelakangan lainnya. Kesempatan kerja adalah ketersediaan

lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah indikator penting suatu perekonomian. Kesempatan kerja yang luas menurunkan jumlah orang menganggur, meningkatkan produktivitas penduduk, dan meningkatkan produksi serta pendapatan nasional. Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) dari permintaan terhadap produk barang dan jasa (Situmorang, 2005:1). Berdasarkan definisi yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai lowongan kerja yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Lowongan kerja itu sendiri tergantung dari permintaan tenaga kerja oleh perusahaan (Anggrainy, 2012).

Berikut adalah grafik perkembangan kesempatan kerja di Indonesia tahun 2018 – 2022.



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

**Gambar 1.1 Perkembangan Kesempatan Kerja Indonesia  
Tahun 2018-2022 (Persen)**

Pada gambar 1.1 dapat dilihat perkembangan kesempatan kerja Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2018 kesempatan kerja 94,8 persen, lalu pada tahun 2020 menjadi 94,9 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94,0 persen, kemudian pada tahun 2021 terus menurun menjadi 93,61 persen dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 94,14 persen. Naiknya kembali kesempatan kerja di Indonesia karena kementerian ketenagakerjaan telah melakukan sejumlah program untuk memperluas kesempatan kerja selama pandemi Covid-19. Tiga di antaranya adalah kegiatan pelatihan kepada masyarakat (PKM), teknologi tepat guna (TTG), dan pengembangan kompetensi masyarakat lewat Balai Latihan Kerja (BLK).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja salah satunya yaitu inflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga barang atau jasa yang berlarut dan berkepanjangan. Peningkatan tersebut terjadi secara menerus, dapat berakibat pada pertumbuhan inflasi (BPS, 2016). Inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kestabilan pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Akibat dari inflasi salah satunya yaitu pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk keluarga semakin meningkat. Salah satu penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat (Bank Indonesia, 2012). Inflasi yang tinggi atau rendah dapat berpengaruh terhadap suatu industri dalam memikirkan untuk mempekerjakan atau mengurangi jumlah pekerja yang akan dipekerjakan. Ketika tingkat inflasi tinggi maka akan menciptakan harga untuk memproduksi juga meningkat, sehingga dapat berpengaruh pada industri untuk melakukan pengurangan proses produksi dan

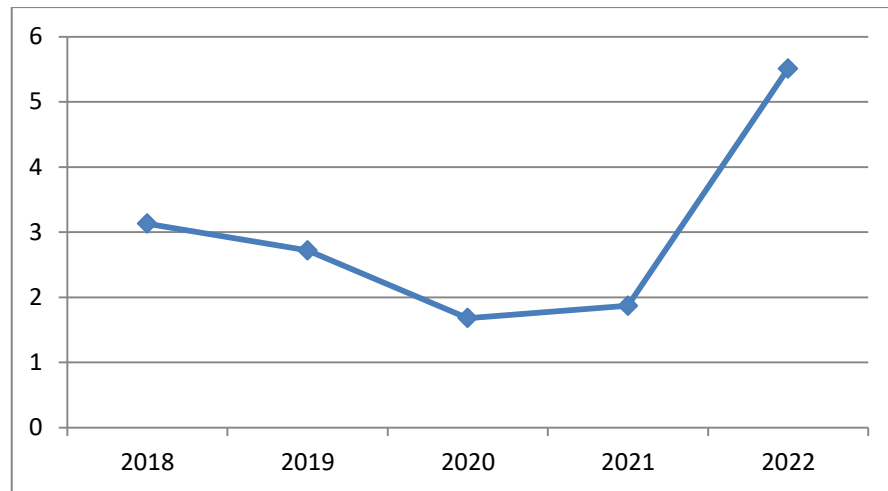
juga karyawan. Perkembangan perekonomian dalam suatu negara dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting bagi suatu negara khususnya negara berkembang. Inflasi digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian, perubahan indikator dalam ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya.

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur stabilitas tidaknya pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Tidak stabilnya laju inflasi dapat menimbulkan efek perekonomian bagi suatu negara yang dapat menyebabkan masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus meningkat. Salah satu penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi juga dari beberapa hasil penelitian. Karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh sisi penawaran terkait dengan gangguan produksi yang disebabkan oleh perubahan iklim, gagalnya musim panen, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, inflasi harus dipantau dan dijaga stabilitasnya agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian (Pojaknas, 2014). Inflasi merupakan suatu hal yang menyebabkan destabilisasi ekonomi terbesar yang bisa memberikan hambatan terhadap pembangunan ekonomi dan

nantinya akan berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Martanto et al, 2021). Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga peramalan inflasi di Indonesia sangat diperlukan untuk perencanaan atau rumusan kebijakan pemerintah (Bank Indonesia, 2022).

Inflasi yang rendah satu sisi dipengaruhi faktor siklikal dari global dan domestik. Dari global, inflasi yang rendah dipengaruhi oleh harga pangan global yang menurun, yang kemudian berpengaruh positif pada tetap terkendalinya harga pangan domestik. Dari domestik, permintaan yang terkendali juga mempengaruhi tekanan inflasi yang terus menurun. Inflasi yang rendah pada sisi lain tidak terlepas dari pengaruh perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan struktural dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang konsisten menjangkar ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Struktur pasar yang semakin kompetitif juga sejalan dengan struktur persaingan pasar ritel yang semakin kompetitif di tengah perkembangan *e-commerce* yang makin pesat.

Berikut adalah grafik perkembangan inflasi di Indonesia tahun 2018-2022:



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

**Gambar 1.2 Perkembangan Inflasi di Indonesia  
Tahun 2018-2022 (Persen)**

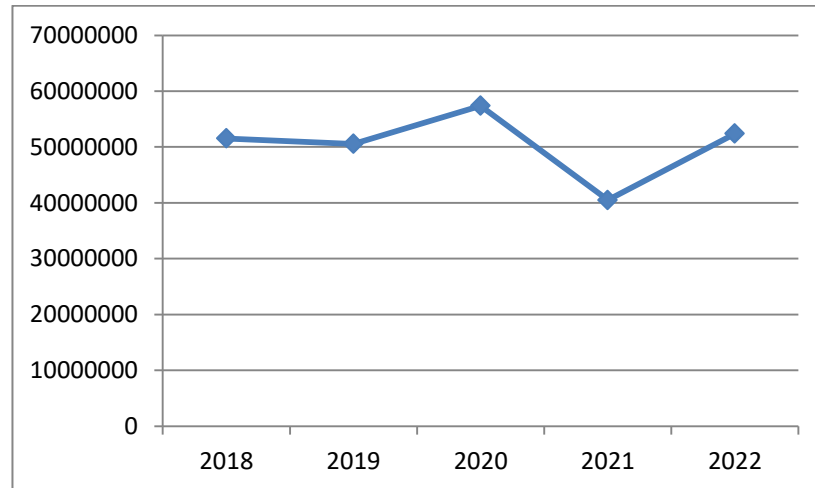
Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan inflasi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Inflasi IHK pada akhir 2018 tercatat 3,13 persen, sehingga membuat inflasi berada dalam kisaran sasaran dalam 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2019 inflasi berada pada angka 2,72 persen dan pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87 persen atau naik dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 1,68 persen. Pada tahun 2022 naik hingga 5,51 persen. Hasil pengendalian ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, perbaikan transparansi pembentukan harga pangan di tingkat konsumen, seperti dengan adanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), juga mempengaruhi penurunan tren inflasi. Perbaikan struktural lain yang memengaruhi penurunan inflasi ialah distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Kondisi ini tidak terlepas dari

dampak positif koordinasi erat bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Faktor pendukung lain yaitu belanja modal yang cukup, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal berkaitan erat dengan istilah investasi. Investasi dapat berarti bermacam-macam, tergantung dari konteks mengartikannya Halim (2008). Dalam bahasa akuntansi pada konteks belanja, investasi dapat timbul dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Dalam membahas belanja modal, maka istilah yang digunakan adalah *capital expenditure* karena memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sularso dan Restianto, 2011). Belanja Modal akan sangat berdampak pada penunjang perekonomian dalam suatu daerah karena belanja modal dikhususkan untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berikut adalah grafik perkembangan belanja modal di Indonesia tahun 2018-2022:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

**Gambar 1.3 Perkembangan Belanja Modal di Indonesia Tahun 2018-2022 (Milyar)**

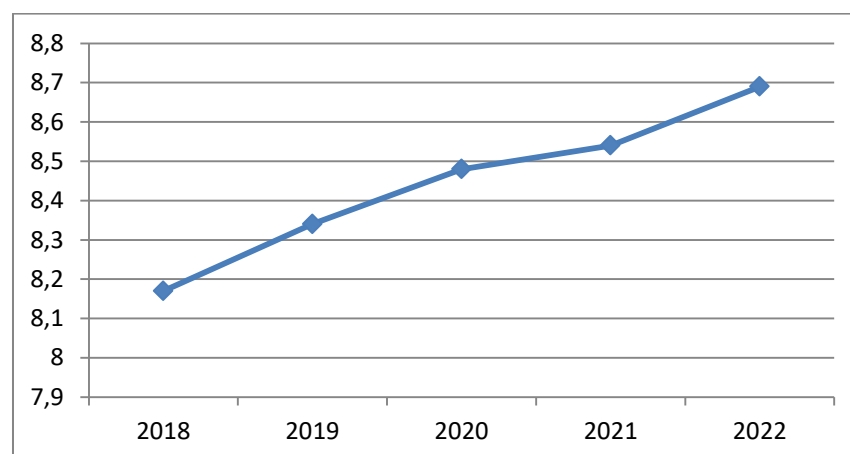
Pada gambar 1.3 menunjukkan perkembangan belanja modal di Indonesia, realisasi belanja modal pada tahun 2019 mengalami kontraksi, kontraksi belanja modal mengakibatkan investasi pemerintah melambat sehingga pada tahun 2019 turun menjadi 50.566,09 milyar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 51.522,23 milyar. Namun pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 57.371,38 milyar. Pada tahun 2021 turun kembali menjadi 40.491,12 milyar, tetapi pada tahun 2022 naik menjadi 52.401,96 milyar.

Faktor pendukung lainnya yaitu tingkat *human capital* yang tinggi. Menurut Rahayu dan Trisnawati (2014), tingkat pendidikan dapat berperan penting dalam menentukan pekerjaan, semakin tingginya pendidikan maka akan semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Makin baik kualitas pendidikan, maka makin besar pula harapan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan



mendatang (Kurniawan, 2016). Para ekonom sebelumnya hanya mengenal capital fisik berupa alat-alat, mesin, dan peralatan produktif lainnya yang diperkirakan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi saja tidak cukup menjadi alasan untuk memberikan kontribusi keberhasilan pada suatu organisasi, untuk mengelola teknologi yang semakin pesat membutuhkan tenaga yang cukup terampil secara pikiran. Analisis modal manusia dimulai dengan asumsi bahwa individu membutuhkan pendidikan, pelatihan, perawatan medis, dan penambahan lainnya, pada pengetahuan dan kesehatan dengan menimbang manfaat dan biaya. Manfaat termasuk keuntungan moneter non budaya dan lainnya bersama dengan peningkatan pendapatan dan pekerjaan, sementara biaya biasanya tergantung terutama pada nilai terdahulu dari waktu yang dihabiskan untuk investasi tersebut.

Berikut adalah grafik perkembangan *human capital* di Indonesia tahun 2018-2022.



Sumber Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.4 Perkembangan Human Capital di Indonesia  
Tahun 2018-2022 (Tahun)**

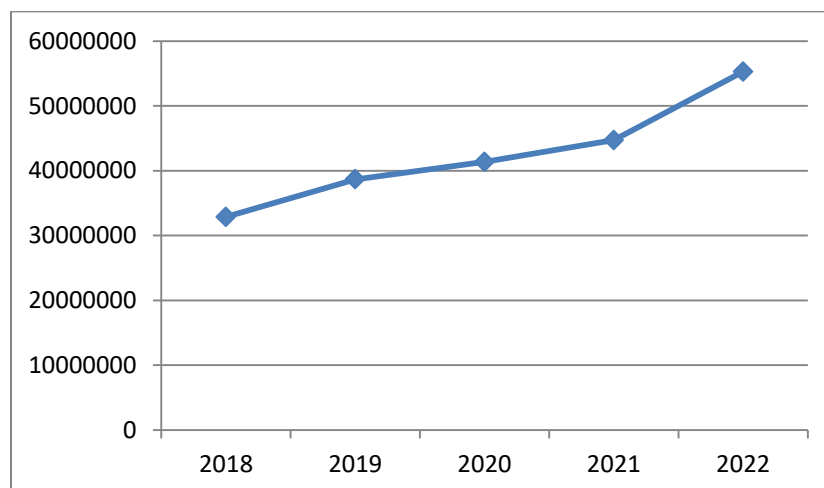
Pada gambar 1.4 menunjukkan perkembangan *human capital* di Indonesia tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 *human capital* di Indonesia berada pada angka 8,17 tahun, tahun 2019 berada pada angka 8,34 tahun, tahun 2020 pada angka 8,48 tahun, tahun 2021 pada angka 8,54 tahun, dan tahun 2022 berada pada angka 8,69 tahun.

Penjelasan dari pengertian di atas dapat diambil maknanya bahwa *human capital investment* memang harus dilakukan, selain dapat meningkatkan pekerjaan juga dapat meningkatkan penghasilan. Meningkatkan pekerjaan berarti bahwa setiap tenaga kependidikan melakukan satu kali peningkatan pendidikan maka akan meningkat juga tugas dan jabatan dari tenaga kependidikan tersebut, begitu juga dengan penghasilan.

Selain faktor diatas dukungan investasi melalui program Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga bisa menjadi faktor pendukung untuk menciptakan kesempatan kerja yang baik. Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia sangat berperan penting dalam peningkatan perekonomian, oleh karenanya pemerintah perlu berupaya untuk terus meningkatkan perekonomian melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot penanaman modal dalam negeri. Investasi ini merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. secara teoritis peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya kegiatan ini maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan

atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Terbatasnya permintaan kerja menyebabkan angka pengangguran meningkat dan merosotnya penyediaan lapangan kerja sehingga akan menurunkan angka penyerapan tenaga kerja.

Berikut adalah grafik perkembangan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia tahun 2018-2022.



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

**Gambar 1.5 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia Tahun 2018-2021 (Milyar)**

Pada Gambar 1.5 dibawah menunjukkan perkembangan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam kurun waktu 5 tahun selama periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebesar 32.860,49 milyar, pada tahun 2019 sebesar 38.649,84 milyar, tahun 2020 sebesar 41.353,55 milyar, tahun 2021 sebesar 44.706,36 milyar, dan tahun 2022 sebesar 55.276.90 milyar.

Di samping itu keadaan perekonomian yang semakin baik dengan ditunjukkan peningkatan pendapatan nasional Indonesia yang terus meningkat sampai akhir tahun 2021 meskipun sempat mengalami koreksi akibat adanya pandemi covid-19 selama 2 (dua) tahun terakhir.

Covid-19 bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Pandemi global Covid-19 telah menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi dunia, termasuk di Indonesia, yang berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2020. Data hasil rekonsiliasi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2020 mencatat 1,7 juta orang pekerja terdampak pandemi COVID-19. Studi LIPI (2020) menyatakan mayoritas pekerja yang terkena PHK berusia muda (15–24 tahun). Sektor yang pekerjanya mengalami PHK tertinggi yaitu konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Studi Bank Dunia (2020) juga menyatakan sebanyak 24 persen respondennya terkena PHK pada akhir Mei 2020, dan mayoritas bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan staf gudang. Sementara, 64 persen lainnya mengalami pengurangan upah. Selain itu, terdapat pula pekerja di sektor jasa (46 persen) yang beralih pekerjaan ke sektor agrikultur. Pekerja yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah mereka yang lulusan SMK dan bekerja di perkotaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penting yang mempengaruhi kesempatan kerja seperti inflasi, belanja modal,

*human capital*, penanaman modal dalam negeri, dan covid-19. Faktor tersebut mempunyai angka yang berbeda setiap tahunnya terkhusus pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya covid-19. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Belanja Modal, *Human Capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Covid-19 terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun 2005-2022”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inflasi, belanja modal, *human capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan covid-19 secara parsial terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2005-2022?
2. Bagaimana pengaruh inflasi, belanja modal, *human capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan covid-19 secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2005-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, belanja modal, *human capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan covid-19 secara parsial terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2005-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, belanja modal, *human capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan covid-19 secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2005-2022.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, manfaat yang diharapkan yaitu:

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi yang hendak melakukan penelitian mengenai kesempatan kerja di masa yang akan datang.

##### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesempatan kerja.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kesempatan kerja.

